

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang risiko ancaman terhadap bencana cukup tinggi, baik itu bencana gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lainnya ini disebabkan secara geografis wilayah Indonesia berada diantara lempengan besar Indo-Australia dan Eurasia¹. Dengan demikian, pemerintah Indonesia perlu membuat langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko bencana tersebut jika terjadi. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pengurangan risiko bencana dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah serta perubahan pemikiran bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat². Pengurangan risiko bencana harus dirancang secara sistematis, terpadu dan terencana. Hal ini

¹Anwas M Oos, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 135

² Alimin Haryoso, Perencanaan Kontijensi Menghadapi Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, 2008, hlm.2

didukung pula oleh realita bahwa kondisi Indonesia mempunyai tingkat kerentanan yang tinggi terhadap terjadinya bencana. Namun, penanganan terhadap risiko bencana masih belum mendapat perhatian serius, belum terintegrasi dan tidak terencana³.

Pentingnya masyarakat dalam penanggulangan bencana telah dijadikan kesepakatan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (3) ditegaskan bahwa kegiatan kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha. Salah satu respon positif sekaligus kebijakan pemerintah tentang penanggulangan bencana adalah memasukkan masalah bencana sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2015-2019 yaitu melalui manajemen penanggulangan bencana.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satu wewenang pemerintah pusat/daerah yaitu membuat perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana dan hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

³ Ariadi B Jangka, 2017, Mengurangi Risiko Bencana Alam, (<http://www.pikiranmerdeka.co/news/mengurangi-risiko-bencana-alam-editorial/>) di akses pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 12.56 WIB.

Sebagai upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh (*comprehensif*), masyarakat telah dijadikan sebagai salah satu unsur terpenting. Masyarakat sebagai basis utama dalam manajemen penanggulangan bencana, hal ini dikarenakan masyarakat sebagai aktor utama terutama selama proses penyelamatan jika sewaktu terjadi bencana sampai pada tahap pemulihannya. Selain itu masyarakat terutama yang tinggal di daerah rawan bencana adalah pihak yang paling rentan terhadap bencana. Kondisi ini mengisyaratkan, bahwa upaya peningkatan kapasitas partisipasi dan solidaritas diantara masyarakat dan wadah partisipasi yang semakin diperlukan.

Dalam rangka peningkatan peran-peran masyarakat dalam penanggulangan bencana, maka pemerintah memfasilitasi dalam gerakan organisasi masyarakat terkait Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) telah tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana adalah telah dibentuknya forum PRB Desa /Kelurahan dan tim siaga bencana masyarakat, serta tertuang dalam Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 193/LJS/X/2011 tentang Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana yang telah melahirkan 119 kampung siaga bencana yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Indeks Rawan Bencana Tahun 2017 menyebutkan bahwa Kota Padang termasuk tiga Ibukota Provinsi yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi terbanyak, yaitu empat jenis bencana sekaligus diantaranya gempa bumi, tsunami, banjir dan longsor. Pada tahun 2013, Padang termasuk dalam kategori tinggi dan rentan

terhadap bencana dan, peringkat ke-10 di tingkat nasional dan nomor 1 di antara kabupaten / kota di Sumatera Barat (BNPB, 2013)⁴.

Selain itu, Kota Padang juga berpotensi akan terjadinya banjir berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, ketinggian air rata-rata 50 sentimeter (cm) di beberapa lokasi seperti Pengambiran Arai Pinang, Lubuk Begalung, Alang Lawas, By Pass, dan sejumlah lokasi lain⁵. Sejumlah warga di beberapa kawasan tersebut, mengharapkan pemerintah agar memberikan informasi yang akurat karena jika terjadi banjir masyarakat setempat atau yang sekedar melintas di daerah tersebut lebih antisipatif dan dapat meminimalisir jatuhnya korban⁶.

Data rekap kejadian bencana yang terjadi di Kota Padang dari tahun 2015-2017 berdasarkan bencana yang sangat berdampak terhadap masyarakat yang diukur dari adanya laporan dari masyarakat dapat dilihat pada Tabel 1.1:

Tabel 1. 1 Rekap Kejadian Bencana Kota Padang 2015-2017

No.	Jenis & Kejadian	2015	2016	2017
1.	Banjir	10 kali	11 kali	27 kali
2.	Longsor	8 kali	16 kali	16 kali
3.	Angin badai puting beliung	1 kali	2 kali	12 kali
4.	Gempa bumi	0 kali	1 kali	0 kali

Sumber: Data rekap kejadian bencana tahunan bidang kedaruratan & logistik BPBD Kota Padang 2018

Dari data rekap kejadian bencana Kota Padang 3 tahun belakangan, bencana yang sering terjadi adalah banjir yang mana setiap tahunnya terjadi

⁴Roni Ekha Putera, Heru Nurasa, and Suprayogi Sugandi, 2016, Synergizing Stakeholders in Reducing Risk of Earthquake and Tsunami-Disaster in the Most Vulnerable Area. International Journal of Administrative Science & Organization, Volume 23, No. 3. hlm 148.

⁵Puspita, Ratna. 2017. Diguyur Hujan 5 Jam, Padang dikepung Banjir, (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/09/ow0bhx-diguyur-hujan-deras-5-jam-padang-dikepung-banjir>) diakses pada tanggal 10 April 2018 pukul 22.30 WIB

⁶Darlis. 2017. Masyarakat Padang Perlu Peta Daerah Rawan Banjir (<https://sumbar.antaranews.com/berita/211975/masyarakat-padang-perlu-peta-daerah-rawan-banjir>) diakses pada tanggal 10 April 2018 pukul 22.51 WIB

peningkatan. Banjir terjadi karena debit/volume air yang mengalir pada suatu saluran drainase melebihi atau diatas kapasitas pengalirannya. Luapan air biasanya tidak menjadi persoalan bila tidak menimbulkan kerugian, korban meninggal atau luka-luka, tidak merendam permukiman dalam waktu lama, tidak menimbulkan persoalan lain bagi kehidupan sehari-hari. Bila genangan air terjadi cukup tinggi, dalam waktu lama, dan sering maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan manusia. Rentannya terjadi bencana banjir tersebut perlu adanya upaya penanggulangan bencana. Jika suatu daerah telah sering mengalami bencana banjir, mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebaiknya diperkuat. Dengan demikian dapat meminimalisir risiko jatuhnya korban ataupun kerugian secara materil pada saat terjadinya banjir.

Penanggulangan bencana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi beberapa tahapan diantaranya: pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut bertujuan untuk mengurangi besarnya kerugian akibat terjadinya bencana (mitigasi bencana) dapat dilakukan sebelum terjadi bencana (kegiatan pencegahan atau pra bencana), pada saat terjadi bencana (masa tanggap darurat), serta setelah terjadinya bencana (pasca bencana) . Bahaya dapat dicegah dengan adanya kesadaran atau kewaspadaan dari awal sebelum bencana terjadi. Dalam penanggulangan bencana,

dibutuhkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dengan dilakukannya kerjasama dalam penanggulangan bencana pada saat pra-bencana⁷.

Dari persoalan yang telah diuraikan sebelumnya maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada tahap pra-bencana. Karena pada tahapan inilah dapat dilakukan pencegahan dan pengurangan besarnya risiko bencana yang akan menimpa. Dengan demikian, tidak banyaknya kerugian yang dialami masyarakat dan korban berjatuh yang diakibatkan oleh bencana alam. Maka, perlu adanya pengurangan risiko bencana pada tahap pra-bencana. Pada tahap pra-bencana yang dilakukan dengan serius dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah, selain itu jika tahap ini dilakukan dengan sebaik-baiknya maka 1 USD belanja publik untuk pra-bencana dapat menghemat 7 USD dari kerugian akibat terjadinya bencana⁸. Selain itu pada tahap pra bencana ini, masyarakat dapat diaktifkan dalam deteksi dini dan peringatan dini banjir, masyarakatlah yang posisinya berdekatan dengan sumber bencana sehingga dapat melakukan deteksi dini gejala terjadinya bencana.

Berdasarkan Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2014-2019, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana yang meliputi upaya pengurangan resiko, pencegahan, pemanduan perencanaan pembangunan, dan penetapan analisis resiko bencana serta pemberdayaan

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

⁸ Roni Ekha Putera, 2017, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Berbasis Mitigasi Bencana di Kota Padang. Disertasi. Bandung. Universitas Padjadjaran. Tidak dipublikasikan. Hlm. 18-19

masyarakat⁹. BPBD merupakan *leading sector* dalam penanggulangan bencana, yang hendaknya memiliki kontribusi yang positif dalam mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, sehingga dapat dipercaya bisa melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Akan tetapi mencegah dan menanggulangi bencana banjir tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja atau orang perorang.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Nomor 229 Tahun 2017 tentang Penunjukan Relawan Pemberi Informasi (*Roll Call*) Kebencanaan Di Kota Padang, menetapkan bahwa personil/anggota/relawan kebencanaan lainnya siap untuk membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam memberikan informasi awal mengenai kebencanaan di masing-masing wilayah, kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian, untuk Kota Padang memiliki Kelompok Siaga Bencana di setiap kecamatan dan kelurahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang telah membentuk sebuah kelompok masyarakat yang disebut Kelompok Siaga Bencana (KSB) di tiap kelurahan dan kecamatan. Pemerintah Kota Padang telah membentuk dan meresmikan Organisasi Kelompok Siaga Bencana sebanyak 2.080 anggota dalam 104 Kelurahan yang ada di 11 Kecamatan Kota Padang¹⁰.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk

⁹ Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang Tahun 2014-2019

¹⁰ Ibid, hlm 166-167.

mengatasi masalah tersebut¹¹. BPBD Kota Padang merupakan aktor dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sehingga, harapan dilakukannya pemberdayaan tersebut masyarakat dapat secara mandiri melakukan penanggulangan bencana tanpa bergantung kepada pemerintah atau BPBD Kota Padang. Pemberdayaan masyarakat ini juga merupakan upaya dari BPBD Kota Padang dalam penanggulangan bencana agar risiko bahaya bencana tersebut dapat dikurangi. Bentuk dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang kepada masyarakat adalah pelatihan dan sosialisasi. Hal ini diungkapkan oleh Staff Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang yang mengatakan, bahwa:

“ bentuk pemberdayaan masyarakat yang telah kami lakukan bersama KSB untuk masyarakat adalah sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap bencana sedangkan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bencana.” (Wawancara dengan Rezko Staff Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang pada tanggal 13 April 2018 pukul 10.30 WIB)

Namun, dalam melakukan pemberdayaan masyarakat BPBD Kota Padang tidak langsung memberikan pelatihan kepada masyarakat luas. Mengingat sumber daya manusia BPBD Kota Padang yang sedikit dan tidak memungkinkan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat se-Kota Padang. Maka, dalam melakukan pemberdayaan masyarakat BPBD Kota Padang membentuk KSB disetiap kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Padang, yang mana dalam

¹¹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, Alfabeta, 2017, hlm.68

kepengurusan KSB tersebut merupakan masyarakat yang menjadi sasaran dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang. Sehingga dengan demikian, diharapkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dapat diterima oleh masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang yaitu dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada KSB, dan setelah menerima pelatihan dari BPBD maka KSB lah yang nantinya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan wilayah mereka masing-masing. BPBD melakukan pelatihan terhadap 11 kecamatan yang ada di Kota Padang dengan harapan mereka mampu menjadi fasilitator, paling tidak fasilitator dimana lokasi mereka tinggal dengan materi pelatihan tentang pengetahuan umum yang berkaitan dengan kebencanaan. Dokumentasi pelatihan yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang kepada KSB se Kota Padang dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Pelatihan BPBD bagi KSB se Kota Padang



Sumber: Media sosial instagram Pusdalopas BPBD Kota Padang 2019

KSB merupakan suatu kelompok masyarakat yang peduli akan bahaya bencana, dengan adanya KSB ini maka diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang tidak tergabung dengan kepengurusan KSB. Sehingga nantinya upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dapat dikelola dan dikoordinir dengan baik serta dapat meminimalisir jumlah korban yang berkemungkinan terjadi akibat bencana. Adanya KSB ini, dapat membantu masyarakat dalam meringankan beban sosialnya, seperti anggota KSB dapat memberikan pelatihan pada saat sebelum terjadinya bencana dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat meringankan masyarakat. KSB sangat membantu pemerintah terutama BPBD Kota Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama yang sangat terbantu adalah masyarakat. KSB dapat dengan cepat dan mudah menjangkau wilayahnya yang terkena bencana. Masyarakat akan dapat dengan cepat memperoleh bantuan ketika terjadinya bencana. Hal ini dibenarkan oleh bapak Firdaus selaku Kasubag Umum BPBD pada observasi awal menyatakan bahwa :

“KSB ini merupakan sebuah wadah yang dibentuk untuk memudahkan kami dalam membantu masyarakat yang terkena bencana secara cepat dan mudah, mengingat sumber daya manusia kami yang sangat terbatas sedangkan Kota Padang yang begitu luas maka dari itu kami memerlukan adanya relawan yang dapat membantu tugas BPBD. “(Wawancara dengan Firdaus Kasubag Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang pada tanggal 11 April 2018 pukul 10.30 WIB.)

Sebagai relawan KSB memiliki beberapa peran dan tugas diantaranya¹² :

- a. Membantu masyarakat mengenali daerah setempat dalam menentukan tempat yang aman untuk mengungsi,

¹² Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Tahun 2018

- b. Peningkatan dan kampanye kesadaran masyarakat,
- c. Sosialisasi mengenai kesiapsiagaan,
- d. Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan/pelatihan,
- e. Pemantauan secara berkala terhadap sumberdaya relawan,
- f. Peningkatan pengetahuan masyarakat lokal khususnya yang tinggal di kawasan rawan bencana,

KSB merupakan perpanjangan tangan dari BPBD dalam pengurangan risiko bencana dikelurahan yang ada di Kota Padang yang nantinya setelah mengikuti pelatihan dari BPBD, anggota KSB tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengatasi dampak bencana dan dapat memberikan pencegahan sebelum terjadinya bencana dilingkungan masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan sebagai fasilitator BPBD Kota Padang mengadakan pelatihan bagi KSB se Kota Padang. Ini bertujuan agar masyarakat lebih cerdas dalam menghadapi segala macam bentuk bencana. Kota Padang memiliki 11 Kecamatan, berikut ini data rekap kejadian bencana banjir yang terjadi di 11 Kecamatan Kota Padang dapat dilihat pada Tabel 1.2 :

Tabel 1. 2 Rekap Kejadian Bencana Banjir Kota Padang Tahun 2017

No.	Kecamatan	Total
1.	Padang Barat	3
2.	Padang Utara	4
3.	Padang Timur	1
4.	Padang Selatan	8
5.	Nanggalo	2
6.	Kuranji	2
7.	Lubuk Begalung	3
8.	Lubuk Kilangan	1
9.	Pauh	1
10.	Koto Tangah	0
11.	Bungus Teluk Kabung	2

Sumber: Data rekap kejadian bencana tahunan bidang kedaruratan & logistik BPBD Kota Padang 2019

Berdasarkan data Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Padang, Padang Selatan yang memiliki risiko ancaman terhadap banjir yang paling tinggi, untuk itu maka diperlukan adanya pencegahan dalam pengurangan risiko bencana banjir. Di Kecamatan Padang Selatan sendiri ada beberapa titik daerah yang merupakan daerah rawan banjir yaitu Kelurahan Mata Air dan Kelurahan Rawang yang menjadi lokasi terparah terkena genangan banjir dengan ketinggian 1,5 meter, tiap kali hujan deras kawasan ini sudah sering terkena banjir¹³. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Camat Padang Selatan, yang mengatakan :

“ untuk Kecamatan Padang Selatan sendiri risiko terjadi bencana banjir yang sering terjadi adalah Kelurahan Rawang dan Kelurahan Mata Air. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang menjadi langganan banjir ketika hujan terjadi selama kurun waktu 5-6 jam. Untuk itu dalam pengurangan risiko bencana banjir kami memiliki KSB kecamatan yang membantu untuk memberdayakan masyarakat dalam kebencanaan” (Wawancara dengan Robert Candra Eka Putra. S.Sos, M.Si Sekretaris Kecamatan Padang Selatan pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 10.00 WIB.)

Selain menjadi daerah rawan terhadap banjir, Kelurahan Mata Air dan Kelurahan Rawang juga merupakan dua wilayah di Kecamatan Padang Selatan yang memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga hal ini menyebabkan banyaknya korban yang rentan terhadap banjir di wilayah ini. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk Kecamatan Padang Selatan Tahun 2018 :

¹³Intan Fauzi, 2017, Judul Rawang Daerah Terparah Banjir Padang (<http://news.metrotvnews.com/daerah/xkEryLDK-jondul-rawang-daerah-terparah-banjir-padang>) di akses 26 April 2018 pukul 21.45 WIB

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Kecamatan Padang Selatan Tahun 2018

No.	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk
1.	Belakang Pondok	1.410
2.	Alang Laweh	3.289
3.	Ranah Parak Rumbio	2.468
4.	Pasa Gadang	4.400
5.	Batang Arau	4.385
6.	Seberang Palinggam	3.254
7.	Seberang Padang	7.042
8.	Mata Air	12.747
9.	Rawang	11.016
10.	Air Manis	1.719
11.	Bukit Gado-Gado	1.692
12.	Teluk Bayur	2.566
	Jumlah	55.988

Sumber: Dokumentasi Data Kependudukan Kecamatan Padang Selatan Tahun 2019

Dari data tabel 1.3 tersebut dapat dikatakan bahwa untuk Kecamatan Padang Selatan sendiri Kelurahan Rawang dan Kelurahan Mata Air merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dibandingkan 10 kelurahan lainnya. Selain itu, daerah ini juga memiliki karakteristik tanah rawa sehingga ini menjadi faktor penyebab dua kelurahan tersebut rentan terhadap banjir. Hal serupa diungkapkan oleh Ketua KSB Kecamatan Padang Selatan yang mengatakan, bahwa:

“tidak semua kelurahan di Kecamatan Padang Selatan terdampak banjir, ada dua kelurahan yang menjadi daerah yang rentan terhadap banjir yakni kelurahan mata air dan kelurahan rawang yang mana daerah tersebut merupakan daerah rawa.” (Wawancara dengan Kobeng Ketua KSB Kecamatan Padang Selatan tanggal 18 Mei 2018 pukul 14.00 WIB)

Dengan demikian, penanggulangan banjir tentu saja dibutuhkan oleh masyarakat. Dampak banjir terhadap masyarakat tidak hanya berupa kerugian harta benda dan bangunan, selain itu banjir juga sangat mempengaruhi perekonomian

masyarakat dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan, terutama kesehatan dan pendidikan. Dalam pencapaian dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan terorganisir, maka Kecamatan Padang Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Camat Padang Selatan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengurus Forum KSB Kecamatan Padang Selatan Periode 2017-2020. Nama pengurus Forum KSB tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.4 :

Tabel 1. 4 Nama Pengurus Forum Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kecamatan Padang Selatan Periode 2017-2020

Nama	Jabatan	KSB Kelurahan
Camat Padang Selatan	Pelindung	-
Kapolsek Padang Selatan	Pelindung	-
Danramil Padang Selatan	Pelindung	-
Sekretaris Kecamatan Padang Selatan	Penasehat	-
Kasi Trantib & PB Kecamatan Padang Selatan	Pembina	-
Benny Abeng Law	Ketua FKSB	Belakang Pondok
Jailani. R	Wakil Ketua FKSB	Seberang Padang
Muas Nilson	Sekretaris FKSB	Seberang Palinggam
Yusrizal Aris	Wakil Sekretaris FKSB	Alang Laweh
Lelen Karman	Bendahara FKSB	Batang Arau
Yudi Surya Putra	Koor. Bidang Pendataan	Ranah Parak Rumbio
Raffles	Koor. Bidang Perencanaan	Air Manis
Ali Muzar	Koor. Bidang Logistik	Bukit Gado-Gado
A.Wahyu	Koor. Bidang Evakuasi/TRC	Rawang
Munizar	Koor. Bidang Kesehatan	Teluk Bayur
Rosani	Koor. Bidang Dapur Umum	Alang Laweh
Hardeswan	Koor. Bidang Administrasi	Pasa Gadang
Syahrul B.	Koor. Bidang Komunikasi	Mata Air
Dedi Idris	Koor. Bidang Humas	Alang Laweh

Sumber : Dokumen Surat Keputusan Camat Padang Selatan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengurus Forum Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kecamatan Padang Selatan Periode 2017-2020

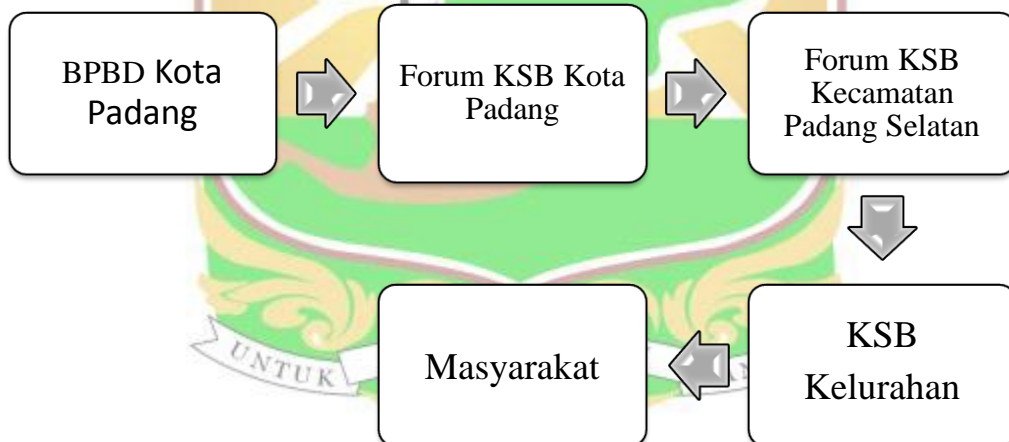
Dengan dibentuknya Forum KSB tersebut maka dapat diharapkan koordinasi antara BPBD Kota Padang dengan Forum KSB Kecamatan Padang Selatan dan KSB Kelurahan dapat berjalan secara optimal. Hal ini dibenarkan oleh salah satu staff BPBD Kota Padang di bidang Kesiapsiagaan yang mengatakan bahwa :

“ koordinasi yang kami (BPBD) lakukan terhadap KSB dari Kota Padang, kecamatan hingga kelurahan yaitu sebenarnya untuk Kota Padang sendiri memiliki Forum KSB Kota Padang yang mana anggotanya ditarik dari beberapa kader dari KSB Kecamatan. Begitu

pula dengan Forum KSB Kecamatan yang memiliki anggota dari beberapa kader dari KSB Kelurahan. Sehingga nantinya kami (BPBD) dengan gampang untuk melakukan koordinasi dibawah “ (Wawancara dengan Rezko Staff Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Kota Padang pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara peneliti tersebut, maka dapat dikatakan bahwa untuk dapat mengkoordinir seluruh KSB Kelurahan yang ada, maka BPBD membentuk Forum KSB Kota Padang dan Forum Kecamatan yang nantinya anggota dalam forum tersebut merupakan perkumpulan dari KSB Kelurahan yang ada. Dengan demikian, BPBD dapat memberikan atau mendapatkan informasi dengan mudah. Berikut merupakan bagan proses pemberdayaan yang dilakukan BPBD Kota Padang bersama KSB Kecamatan Padang Selatan :

Gambar 1. 2 Bagan Proses Pemberdayaan Masyarakat



Sumber: Hasil wawancara peneliti dengan Staff Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang Tahun 2019

Dari Gambar 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa proses pemberdayaan masyarakat BPBD Kota Padang melakukan pelatihan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada Forum KSB Kota Padang yang mana didalam forum tersebut merupakan kumpulan relawan yang ada di kecamatan dan kelurahan yang ada di

Kota Padang. Setelah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi sebagai bentuk pemberdayaan dari BPBD Kota Padang, maka KSB yang nantinya akan melakukan pemberdayaan lagi kepada masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Forum KSB Kota Padang yang mengatakan bahwa :

“dalam melakukan pemberdayaan masyarakat BPBD Kota Padang terlebih dahulu melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada kami (KSB) sebagai bentuk pemberdayaan yang mereka lakukan. Setelah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi, maka kamilah yang nantinya memberikan sosialisasi dan pelatihan tersebut kepada masyarakat sesuai wilayah masing-masing.” (Wawancara dengan Ali Yanuar Ketua Forum KSB Kota Padang 14 April pukul 11.00 WIB)

KSB Kecamatan Padang Selatan telah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi mengenai kebencanaan. Hal ini dibenarkan oleh salah satu peserta yang ikut pelatihan tersebut yaitu selaku ketua KSB Kecamatan Padang Selatan, beliau mengatakan:

“Pada hari peringatan kesiapsiagaan kemaren kami selaku pengurus KSB Kecamatan Padang Selatan diundang untuk mengikuti pelatihan yang berbentuk pengetahuan, keterampilan dan kecakapan dalam menanggulangi bencana. Nantinya kami juga melakukan pelatihan langsung kepada masyarakat berupa sosialisasi dan pelatihan yang menyangkut dalam penanggulangan bencana ini”. (Wawancara dengan Kobeng Ketua Kelompok Siaga Bencana Kecamatan Padang Selatan pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 14.20 WIB.).

Dalam pelatihan KSB tersebut beberapa materi yang perlu diberikan untuk peningkatan kemampuan mitigasi banjir antara lain : pelatihan manajemen dasar penanggulangan bencana, pelatihan sar, pelatihan jadi fasilitator. KSB diharapkan untuk dapat melakukan peringatan bencana langsung ke masyarakat untuk evakuasi. Akan tetapi, KSB sebagai relawan tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pelatihan secara menyeluruh kepada masyarakat. Sehingga pemberdayaan yang dilakukan belum dapat diimplementasikan sesuai dengan

prosedur penanganan bencana. Hal ini dibuktikan dengan wawancara dengan salah satu anggota KSB Kecamatan Padang Selatan :

“ untuk melakukan pelatihan secara berkala kami tidak memiliki dana yang cukup, karena kami hanya relawan yang tidak memiliki ikatan dinas ataupun ikatan kerja. Yang kami lakukan merupakan bentuk kegiatan kemanusiaan terhadap masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir. “ (Wawancara dengan Firson Dinata selaku anggota KSB dari Kelurahan Rawang pada tanggal 21 Mei 2018 pada pukul 15.20 WIB).

Selain melakukan pelatihan, KSB juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk himbuan kepada masyarakat bahwa bahaya bencana banjir yang terjadi, sosialisasi akan penyebab terjadinya banjir serta penyuluhan tentang penanganan bencana banjir. Namun, sosialisasi yang dilakukan tidak terjadwal dan lebih bersifat situasional, hal ini di buktikan dengan wawancara dengan Ketua KSB Kecamatan Padang Selatan :

“ kami tidak memiliki jadwal untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat karna kami hanya relawan yang tidak memiliki dana untuk melakukan sosialisasi secara rutin dan terjadwal. Akan tetapi, kami melakukan sosialisasi pada saat bertemu dengan masyarakat secara personal dan mengingatkan bahwa bahaya dan dampak yang akan terjadi pada saat bencana banjir ”. (Wawancara dengan Kobeng Ketua KSB Kecamatan Padang Selatan pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 14.25 WIB)

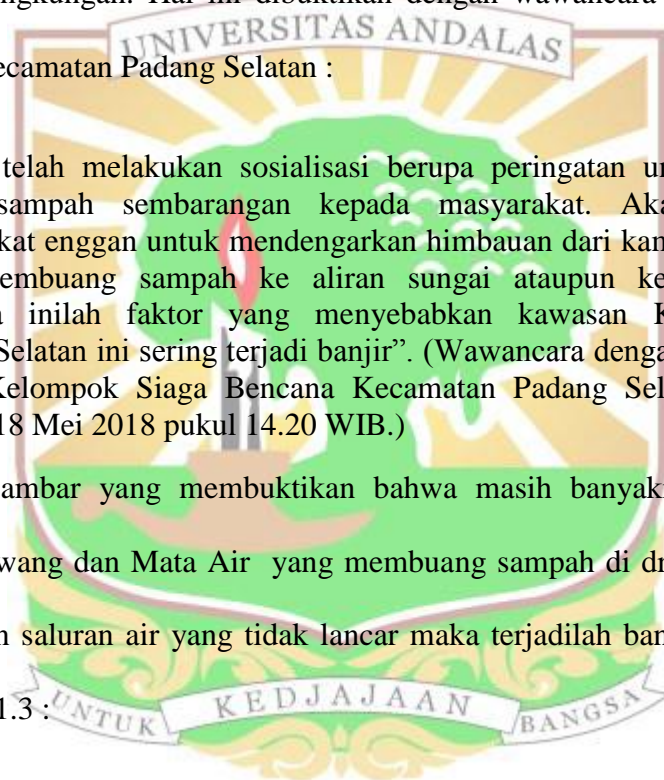
Dibutuhkan komitmen dan kerjasama berbagai pihak untuk menghindari dari banjir, salah satunya adalah mengubah perilaku masyarakat agar tidak menjadikan aliran drainase menjadi tempat sampah¹⁴. Dalam hal ini yang perlu disadari adalah bahwa bencana banjir dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor non-alam maupun manusia

¹⁴ Iwan R, 2017, Masalah Banjir di Jondul Rawang Padang, Ini Kata Pengamat Lingkungan Hidup, (<http://news.klikpositif.com/baca/19306/masalah-banjir-di-jondul-rawang-padang--ini-kata-pengamat-lingkungan-hidup>) diakses pada tanggal 13 Juli 2018 pukul 23.45 WIB.

sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi. Namun kesadaran masyarakat masih kurang terhadap pencegahan banjir, hal ini dapat dilihat dari cara hidup masyarakat yang sebagian besar belum masih mencerminkan budaya hidup bersih dan sehat. Masyarakat terbiasa untuk membuang sampah di sepanjang aliran sungai dan drainase tanpa peduli terhadap dampaknya, dan kebiasaan masyarakat yang tidak ramah pada lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan Ketua KSB Kecamatan Padang Selatan :

“ kami telah melakukan sosialisasi berupa peringatan untuk tidak buang sampah sembarangan kepada masyarakat. Akan tetapi, masyarakat enggan untuk mendengarkan himbauan dari kami, mereka tetap membuang sampah ke aliran sungai ataupun ke drainase sehingga inilah faktor yang menyebabkan kawasan Kecamatan Padang Selatan ini sering terjadi banjir”. (Wawancara dengan Kobeng Ketua Kelompok Siaga Bencana Kecamatan Padang Selatan pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 14.20 WIB.)

Berikut gambar yang membuktikan bahwa masih banyaknya masyarakat Kelurahan Rawang dan Mata Air yang membuang sampah di drainase sehingga mengakibatkan saluran air yang tidak lancar maka terjadilah banjir dapat dilihat pada Gambar 1.3 :



Gambar 1. 3 Saluran drainase yang masih tersumbat oleh sampah



Sumber : Hasil foto peneliti saat survei awal tahun 2019

Oleh sebab itu, melihat hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sosialisasi penanggulangan bencana banjir harus terus diupayakan secara integral kepada seluruh elemen yang ada, baik pemerintah daerah, non pemerintah dan masyarakat karena ini sangat dibutuhkan dalam penanggulangan bencana yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Dengan demikian, sebagai perpanjangan tangan dari BPBD, KSB yang telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi seputar kebencanaan dari BPBD bertugas untuk memberikan pelatihan tersebut kepada masyarakat sesuai dengan wilayah KSB masing-masing. Seperti di Kecamatan Padang Selatan, KSB melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat hanya satu kali selama tahun 2018 dan hanya beberapa orang saja yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu masyarakat Kecamatan Padang Selatan, beliau mengatakan :

“ KSB Kecamatan Padang Selatan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan berupa himbauan untuk tidak membuang sampah, sedangkan pelatihan kami dibawa ke Padang Besi untuk melakukan pelatihan seputar bagaimana menghadapi bencana banjir, pelatihan sar, pelatihan menjadi fasilitator. Namun, sepanjang tahun 2018 ini kami hanya diberikan 1 kali pelatihan dan sosialisasi, untuk perekrutan peserta sendiri itu melalui link atau ditunjuk secara acak”. (Wawancara dengan Yanezril masyarakat Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa tidak semua masyarakat dapat mengikuti pelatihan dan sosialisasi tersebut, sebagian masyarakat tidak tahu apa itu KSB dan apa saja yang dilakukan oleh KSB serta belum meratanya pemahaman masyarakat untuk menyikapi bencana banjir yang terjadi.

Sesuai dengan pendapat Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato dalam bukunya Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, bahwa keberhasilan pemberdayaan bukan diukur dari seberapa jauh terjadi transfer pengetahuan, keterampilan atau perubahan perilaku, tetapi seberapa jauh terjadi dialog, diskusi dan pertukaran pengalaman¹⁵. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan akan berhasil dilakukan apabila sering terjadinya dialog dan diskusi antara KSB dengan masyarakat yang akan diberdayakan. Akan tetapi fenomena yang ditemukan peneliti dilapangan bahwa KSB hanya melakukan pemberdayaan satu kali kepada masyarakat, selain itu BPBD juga tidak

¹⁵ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 68

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan yang telah dilakukan KSB kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh staff bidang kesiapsiagaan dan pencegahan BPBD Kota Padang :

“ kami (BPBD) melatih KSB hanya untuk meningkatkan kapasitas, dan kemampuan KSB saja, selepas itu diberdayakannya atau tidak masyarakat tersebut kami serahkan kepada KSB. Dan sebenarnya tidak ada kewajiban bagi mereka (KSB) atau kami (BPBD) menugaskan untuk melakukan pemberdayaan tersebut kepada masyarakat. maka dari itu kami (BPBD) tidak ada melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan KSB kepada masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat. “ (Wawancara dengan Rezko Staff Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kota Padang pada tanggal 16 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB)

Dari fenomena yang peneliti temukan, bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh KSB Kecamatan Padang Selatan adalah pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat hanya dilakukan satu kali dan proses perekrutan masyarakat yang mengikuti pelatihan dan sosialisasi ini pun ditunjuk secara acak. Sehingga tidak semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana banjir. Hal dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan masyarakat, beliau mengatakan:

“ Kami tidak pernah menerima atau mengikuti pelatihan dan sosialisasi dari KSB, dan saya tidak tahu apa itu KSB serta tugasnya”. (Wawancara dengan Afrizal masyarakat Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 14.10 WIB).

Dari fenomena yang ditemukan oleh peneliti tersebut, dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah hal terpenting yang harus dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan pendapat Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato dalam bukunya Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif

Kebijakan Publik, bahwa upaya penumbuh dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diupayakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dalam praktiknya dilakukan melalui kegiatan komunikasi¹⁶.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan, berdayanya masyarakat yaitu dengan kemampuan masyarakat untuk bergerak sendiri dengan kemandiriannya akan membantu peran KSB dan BPBD serta lembaga-lembaga sosial lainnya dalam penanggulangan bencana. Tidak cukup di KSB saja, pemerintah, swasta juga masyarakat khususnya juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat, bagaimanapun masyarakat merupakan objek yang terkena imbas terjadinya bencana. Oleh karena itu, usaha untuk pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman seputar tentang bencana baik sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya bencana, maupun setelah terjadinya bencana.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang terhadap KSB Kelurahan ini bertujuan agar dampak yang terkena kepada masyarakat tidak besar sehingga dapat mengurangi jatuhnya korban pada saat terjadinya bencana. Hal ini dapat diminimalisir dengan adanya pencegahan risiko bencana pada saat sebelum terjadinya bencana atau pra-bencana. Pada tahap ini, dapat dilakukan sosialisasi tentang tingkat kerentanan bencana. Dengan demikian, untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana sebelum terjadinya bencana, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

¹⁶ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, op.cit., hlm. 96.

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang ada didalam latar belakang dan permasalahan yang terjadi maka peneliti merumuskan permasalahan : Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan proses Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.3.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna bagi peneliti untuk mengembangkan serta menerapkan teori-teori yang telah dipelajari yang nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana banjir di Kecamatan Padang Selatan.

2.1.2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang untuk dapat memberdayakan masyarakat agar dapat meminimalisir terjadinya korban bencana.